

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta dalam rangka perwujudan Good Governance, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021.

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja adalah merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan atas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya mewujudkan tata pemerintah yang baik (Good Governance)

Padang, Januari 2022
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Sumatera Barat

WARDARUSMEN, SE.MM
NIP. 19630522 198601 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

BAB I	PENDAHULUAN.....	2
1.1	Gambaran Organisasi.....	2
1.2	Aspek Strategis Organisasi.....	9
1.3	Strategis dan Kebijakan SKPD.....	11
1.4	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	12
1.5	Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	14
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	17
2.1	Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.....	17
2.2	Rencana Anggaran Tahun 2021.....	22
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
3.1	Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja.....	24
3.2	Hasil Pengukuran Kinerja.....	24
3.3	Capaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.....	26
3.4	Akuntabilitas Anggaran	47
BAB IV	PENUTUP.....	62
4.1	Kesimpulan.....	62
4.2	Saran.....	63
LAMPIRAN	Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
	Lampiran 2 : Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Organisasi

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Kearsipandan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dibentuk dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sedangkan untuk Tugas Pokok dan Fungsi Dinas disusun sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2020.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi, Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tugas

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.

Fungsi

Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan; dan
- e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya.

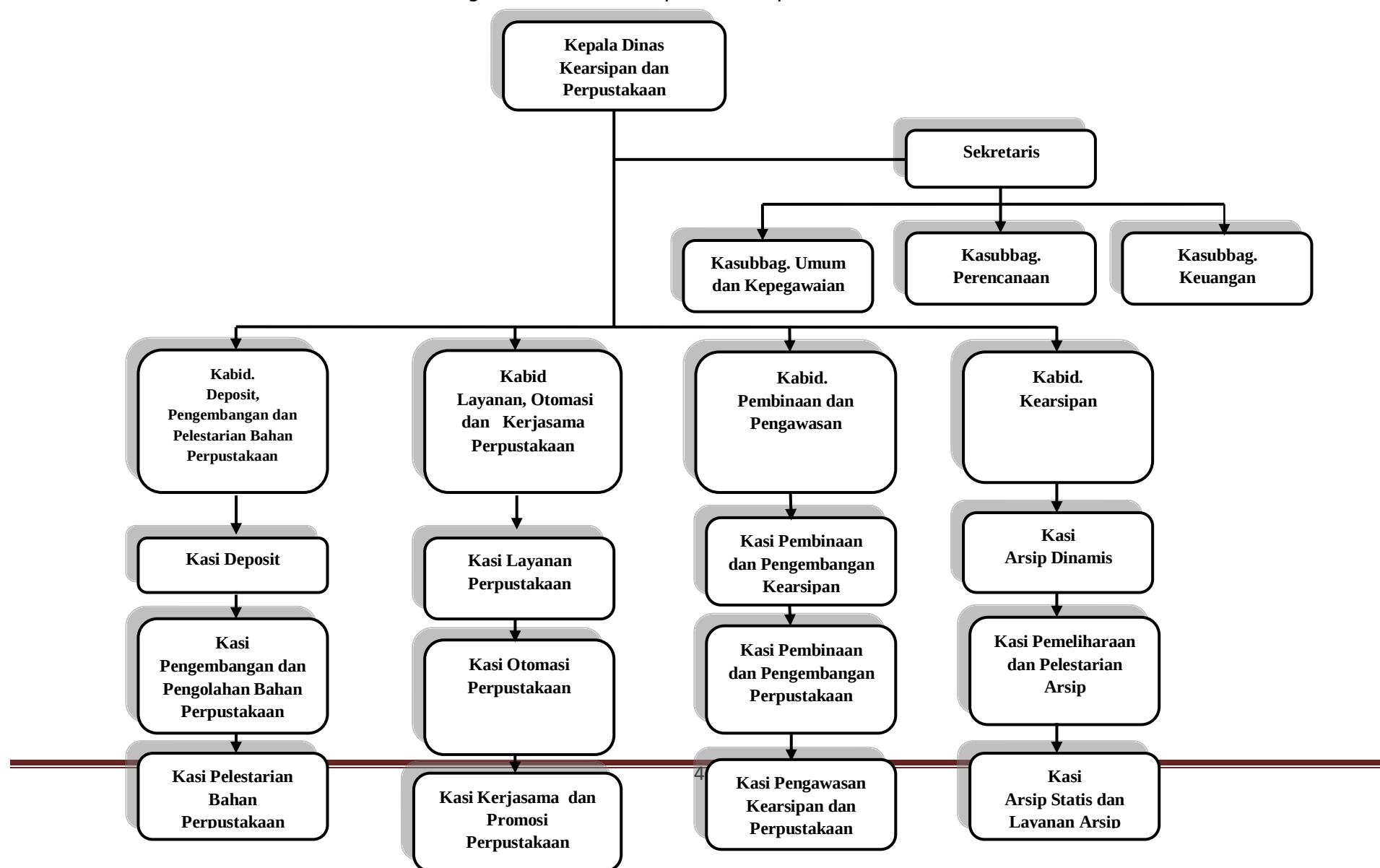
C. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Rincian tugas kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan ditetapkannya Jabatan Fungsional Perencana diharapkan dapat mendorong terbentuknya dan atau pementapan organisasi profesi dari jabatan fungsional yang bersangkutan. Hal ini memungkinkan dapat dirumuskan etika profesi yang merupakan norma terhadap disiplin ilmu dan organisasi yang harus dipatuhi oleh pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat



1.1.1 Sumber Daya Manusia

A. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat hingga periode Desember 2021 berjumlah 120 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 80 orang dan pegawai yang berasal dari pihak ketiga (out sourcing) sebanyak 40 orang.

Alokasi Sumber Daya Manusia berdasarkan jabatan, golongan, pendidikan, fungsional, dan jenis kelamin periode Desember 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut ini:

Tabel 1.1
Daftar Pegawai
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

1) Berdasarkan Jabatan

No.	Uraian	Jumlah
I	Pejabat Struktural	20
	1. Esselon II	1
	2. Esselon III	5
	3. Esselon IV	14
II	Tenaga Fungsional	40
	1. Pustakawan	26
	2. Arsiparis	14
III	Staf PNS	20
	Jumlah PNS	80
IV	Tenaga Pihak Ketiga (Out Sourcing)	40
	1. Satuan Pengamanan	20
	2. Tenaga Kebersihan	15
	3. Sopir	5
	Total	120

2) Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Gol. IV	14
2.	Gol. III	49
3.	Gol. II	17
4.	Gol. I	0
	Total	80

3) Jenjang Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah
1	Strata 2	11
2	Strata 1	35
3	Diploma	5
4	SLTA	28
5	SLTP	0
6	SD	1
	Total	80

4) Jenjang Jabatan Fungsional

No.	Uraian	Jumlah
1	Arsiparis Tingkat Keahlian	10
2	Arsiparis Tingkat Keterampilan	4
3	Pustakawan Tingkat Ahli	13
4	Pustakawan Tingkat Keterampilan	13
	Total	40

5) Berdasarkan Kelamin

No.	Uraian	Jumlah
I	PNS	
	• Laki-laki	39
	• Perempuan	41
II	Pihak Ketiga (Out sourcing)	
	• Laki-laki	27
	• Perempuan	13
	Total	120

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian DAP, tahun 2021

E. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan, serta kinerja aparatur, tentunya peran sarana prasarana sangatlah penting. Berikut pada Tabel 1.2. Disajikan daftar beberapa sarana prasarana pendukung yang dimiliki oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat periode Desember 2021.

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Pendukung
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

➤ **Aset Tanah**

No	Uraian	Lokasi	Luas	Status
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Gedung Pustaka dan Sekretariat	Jln. Diponegoro No. 4 Padang	6.277 m ²	Hak Pakai
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Gedung Arsip dan Depo Arsip	Jln. Pramuka V No. 2 Padang	2.374 m ²	Hak Pakai

➤ **Aset Bangunan**

No	Uraian	Lokasi	Jumlah	Ket
1	Gedung Arsip	Jln. Pramuka	1	Lantai 1
2	Gedung Depo	Jln. Pramuka	1	Lantai 4

3	Gedung Perpustakaan	Jln. Diponegoro	1	Lantai 4
4	Musholla	Jln. Diponegoro	1	Lantai 1
5	Gudang Genset	Jln. Diponegoro	1	Lantai 1

➤ **Aset Kendaraan**

No	Uraian	Sumber	Jumlah	Ket
	Roda 4			
1	Minibus Puskel (Truk)	APBN	1	1986
2	Minibus (Mitsubishi /L.300)	APBN	1	1999
3	Minibus Puskel (Toyota)	APBN	1	2003
4	Minibus Puskel (Toyota)	APBN	1	2003
5	Minibus (Toyota)	APBD	1	2004
6	Minibus Puskel (Toyota)	APBN	1	2009
7	Minibus Puskel (Toyota)	APBD	1	2009
8	Minibus Puskel (Toyota)	APBD	1	2009
9	Truk Sadar Arsip (Isuzu)	APBN	1	2010
10	Minibus (Kijang Inova)	APBD	1	2011
11	Mobil Rescue (Ford / Ranger)	APBN	1	2011
12	Minibus (Kijang Inova)	Hibah	1	2019
13	Minibus (Kijang Inova)	APBD	1	2020
	Roda 2			
1	Sepeda Motor (GL. Max)	APBN	1	1996
2	Sepeda Motor (GL. Pro)	APBN	1	1997
3	Sepeda Motor (Suzuki)	APBN	1	1999
4	Sepeda Motor (Honda Win)	APBN	1	1999

➤ **Fasilitas dan Sarana Informasi**

No	Uraian	Lokasi	Jumlah	Ket
1	Papan Pengumuman	Pustaka/Arsip	2	baik
2	Kotak Pengaduan	Pustaka/Arsip	3	baik
3	Jenis Bahan Promosi	Pustaka/Arsip	3	baik
4	Mobil Keliling	Pustaka	5	baik
5	Mobil Operasional	Arsip	3	baik
6	Mobil Rescue	Pustaka/Arsip	1	baik
7	Mobil Sadar Arsip	Arsip	1	baik
8	Website	Pustaka/Arsip	3	baik
9	E-mail	Pustaka/Arsip	1	baik
10	Buku Data dan Informasi	Pustaka	1	baik
11	Booklet Informasi	Pustaka	1	baik

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian DAP, tahun 2021

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi arahan bagi pengembangan pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. RTRW memberikan arahan bagi pola penyebaran penduduk di wilayah Sumatera Barat. Dari pola penyebaran penduduk ini dapat terlihat bagaimana seharusnya arah pembangunan di masing-masing wilayah kabupaten/kota di Sumatera Barat;
2. Kota Padang sebagai ibukota Provinsi yang juga sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan jasa dan perdagangan, menjadi magnet yang sangat kuat bagi masyarakat untuk datang dan daerah-daerah di sekitar Kota Padang pun ikut merasakan dampak dari hal tersebut. Koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah di daerah-daerah tersebut haruslah terlaksana, sehingga keterpaduan urusan pembangunan pengembangan perpustakaan dan kearsipan dengan wilayah-wilayah tersebut juga dapat terwujud;

3. Khusus pada bidang Perpustakaan perlu segera melakukan langkah-langkah kebijakan sinkronisasi pembangunan perpustakaan dan kearsipan terkait rencana penataan ruang dengan rencana pembangunan dan peningkatan fasilitas Perpustakaan dan Kearsipan di setiap Kabupaten/Kota;
4. Dengan ditetapkannya RTRW, banyak hal yang harus dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai pengemban tugas pelayanan Perpustakaan dan peningkatan minat baca masyarakat dan sadar arsip untuk seluruh OPD (pencipta arsip).

Memperhatikan tingkat sebaran penduduk, dan memperhatikan kualitas lingkungan dengan pengembangan ruang terbuka hijau maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah harus dapat memberikan pelayanan berstandar internasional sehingga pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan akan sejajar dengan Provinsi lain;

Terhadap telaahan RTRW dan KLHS di atas, ditelaah dengan menggunakan analisa SWOT (Strength Weakness Opportunity and Treath) atau analisa Lingkungan Internal (kekuatan dan kelemahan) serta analisa Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan). Hasil telaahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3 yang menggambarkan Analisa Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal Dinas.

Tabel 1.3

**Analisa Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat**

A. Lingkungan Internal

KEKUATAN	KELEMAHAN
Adanya potensi dan sumber daya aparatur (Tenaga administrasi, Pustakawan, Fungsional Arsiparis dan tenaga teknis lainnya)	Rendahnya layanan teknologi informasi dan alih media komunikasi
Adanya sumber dana (APBN dan APBD)	Kualitas sumber daya manusia belum memadai
Adanya Undang-Undang tentang Perpustakaan dan Kearsipan serta peraturan perundangan undangan lainnya	Belum terimplementasinya kebijakan sesuai dengan yang diharapkan

B. Lingkungan Eksternal

PELUANG	TANTANGAN
Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat dan pemustaka	Rendahnya kesadaran dan minat baca sebagian masyarakat, serta kurangnya sadar arsip masyarakat
Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan baca dan informasi	Koleksi bahan bacaan yang kurang bervariasi
Adanya kesiapan masyarakat mengakses teknologi informasi dan komunikasi	Perlunya SDM yang aktif , kreatif di bidang teknologi

Sumber: Data olahan, tahun 2021

1.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Arah dan strategi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, mengacu kepada arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan sasaran - sasaran yang ditetapkan terkait dengan agenda pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Mengacu pada Strategi Pembangunan Sumatera Barat tahun 2016 s.d. 2021 agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan serta secara bersamaan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, strategi dan prioritas pemerintah provinsi yang terkait dan mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan strategi dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui :
 - Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas
 - Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik
2. Untuk terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Sumatera Barat dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dengan strategi dan kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:
 - a) Membangun sistem administrasi kearsipan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan penyediaan pedoman kearsipan dalam bentuk regulasi, meliputi :
 - Menyusun peraturan / pedoman sistem kearsipan

- Mengembangkan kearah sistem administrasi kearsipan digital
- Optimalisasi pelatihan – pelatihan SDM kearsipan baik pejabat fungsional arsiparis maupun pengelola arsip
- b) Optimalisasi akuisisi, perbaikan dan alih media arsip yang bernilai guna meliputi :
 - Akuisisi arsip statis baik diinstansi Pemerintah, BUMN/BUMD, Organisasi Sosial Politik/Organisasi Masyarakat, Swasta maupun Perorangan
 - Meningkatkan preservasi dan alih media arsip statis
 - Mengelola dan merawat arsip baik statis maupun inaktif
- c) Optimalisasi pelayanan dan sosialisasi kearsipan yang dilakukan dengan berbagai metode sosialisasi, seperti :
 - Pameran arsip
 - Promosi jasa kearsipan
 - Penerbitan naskah sumber dan buletin kearsipan
 - Pelayanan informasi arsip
- d) Menyelenggarakan tugas pelayanan dengan melakukan optimalisasi SDM dan pelayanan publik;
- e) Menyelenggarakan tugas pengaturan dengan memberikan pembinaan kepada seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat di daerah untuk mengembangkan pelayanan publik yang baik dan optimal, khususnya di bidang perpustakaan;
- f) Melakukan optimalisasi fasilitas perpustakaan yang sesuai dengan standar perpustakaan;
- g) Meningkatkan dan mengembangkan koleksi perpustakaan serta memfasilitasi pengembangan koleksi semua jenis perpustakaan.

1.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya.

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing urusan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan selama kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

A. Bidang Perpustakaan, permasalahan yang dihadapi:

1. Masih rendahnya sebaran pemerataan layanan perpustakaan;
2. Belum terpenuhinya koleksi buku yang dibutuhkan oleh pemustaka dalam rangka meningkatkan kegemaran membaca;
3. Belum optimalnya prasarana dan sarana teknologi pendukung perpustakaan;
4. Masih kurangnya sumber daya manusia tenaga perpustakaan (pustakawan dan pengelola perpustakaan) dalam rangka meningkatkan pelayanan perpustakaan.

B. Bidang Kearsipan, permasalahan yang dihadapi:

1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah, bahan akuntabilitas, serta memori kolektif dan jati diri bangsa masih rendah;
2. Pelayanan penggunaan dan pemanfaatan arsip sebagai tulang punggung manajemen dan bahan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta memori kolektif dan jati diri bangsa masih rendah;
3. Penyelenggaraan kearsipan belum sepenuhnya sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) kearsipan;
4. Penerapan pengelolaan arsip berbasis digital belum optimal;
5. Status kelembagaan dan kapabilitas unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan belum memadai;
6. Belum terpenuhinya jumlah SDM Kearsipan (Arsiparis dan Pengelola Kearsipan) di masing-masing SKPD Provinsi Sumatera Barat;
7. Masih terbatasnya prasarana dan sarana kearsipan berbasis digital;
8. Program dan kegiatan sosialisasi kearsipan masih kurang.

Dari permasalahan-permasalahan yang dialami di tahun 2016-2021 di atas selanjutnya dipetakan permasalahan untuk menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2021-2026.

Berikut pada tabel berikut digambarkan pemetaan permasalahan untuk menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat:

Tabel. 1.4

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Bidang Perpustakaan		
	1. Masih rendahnya budaya literasi 2. Belum terwujudnya perpustakaan sesuai standar berbasis inklusi sosial untuk memperkuat budaya literasi	1. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat (Pengembangan perpustakaan berbasis digital/e-Book) 2. Rendahnya tingkat budaya literasi	Pengelolaan Perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Provinsi
B.	Bidang Kearsipan		
	1. Tidak adanya jaminan ketersediaan Arsip sebagai alat pertanggungjawaban kegiatan yang autentik dan terpercaya 2. Belum terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dalam pemanfaatan arsip dan peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Belum optimalnya penyelamatan/pelestarian arsip daerah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Ketersediaan SDM pengelola kearsipan yang tidak sebanding dengan jumlah arsip yang harus diolah/lestarikan 3. Sarana dan prasarana yang belum memadai	Keberadaan dan ketersediaan arsip

Sumber: Data Olahan DAP, Tahun 2021

1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, pada hakekatnya memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2021.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

1. Kata Pengantar

2. Daftar Isi

3. **Bab I : Pendahuluan**

Pada Bab ini menyajikan

- a. Gambaran organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, struktur organisasi, sumber daya manusia
- b. Aspek strategis organisasi
- c. Strategi dan Kebijakan OPD
- d. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi.
- e. Sistematika Penyajian laporan Kinerja

4. **Bab II : Perencanaan Kinerja**

Diuraikan ringkasan/iktisar perencanaan kinerja tahun yang bersangkutan

a. Perjanjian Kinerja

Menyajikan target-target penting dan disertai penjelasan apabila terhadap perubahan-perubahan rumusan, sasaran, IKU dan target.

b. Rencana Anggaran tahun 2021

5. **Bab III : Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**

a. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

b. Hasil Pengukuran Kinerja

c. Capaian Kinerja Organisasi

Disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap tujuan dan sasaran strategis serta IKU sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

- Menyajikan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Analisis serta efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

d. Akuntabilitas Anggaran

Disajikan uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

6. **Bab IV : Penutup**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja Dinas Kersipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Esselon II
2. Perjanjian Kinerja Pejabat Esselon III, IV dan staf
3. Penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah selama Tahun 2020
4. Lain lain yang dirasa perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan tahun kelima dari Renstra Tahun 2016-2021. Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU disesuaikan dengan level organisasi atau kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat yang bersangkutan.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

NO	Sasaran Strategis (outcome/output utama)	Indikator Kinerja Utama	Formula
1	2	3	4
a.	a. Meningkatnya kunjungan perpustakaan b. Meningkatnya Kualitas Layanan c. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lembaga Perpustakaan	- Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Jumlah Perpustakaan Yang Dikelola Sesuai Standar	$20 \% \times (\text{Jumlah Kunjungan Perpustakaan pada Tahun } n-1) + \text{Jumlah kunjungan pada tahun } n$ Nilai Rata – Rata Interval Konversi IKM Sesuai Standar Jumlah Perpustakaan Yang Dikelola Sesuai Standar Pada Tahun n
b.	Meningkatnya Pencipta Arsip Yang Tertib Arsip	Jumlah Pencipta Arsip Yang Tertib	Jumlah Penyelenggara Kearsipan Yang Menyelenggarakan Kearsipan Sesuai Prosedur Yang Ditetapkan Pada Tahun n
	Meningkatnya Penggunaan Sistem Kearsipan	Jumlah SKPD Yang Menggunakan Sistem Kearsipan	Jumlah Penyelenggara Kearsipan Yang Menggunakan Sistem Kearsipan Yang ditetapkan Pada Tahun n

	Meningkatnya Penyelamatan Arsip	Jumlah Arsip Yang Diselamatkan	Jumlah Arsip Yang Diselamatkan Pada Tahun n
--	---------------------------------	--------------------------------	---

Dari penetapan indikator kinerja utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat merupakan sebagai dasar dalam menetapkan Indikator Kinerja sasaran, Sasaran tersebut merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu tertentu. Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Penetapan sasaran strategis memberikan fokus pada penyusunan kegiatan. Indikator sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran pada				
						Tahun ke-				
						2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Gemar dan Budaya Baca Masyarakat	Indeks Minat Baca Masyarakat	1. Meningkatkan kunjungan perpustakaan	a. Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	%	20	20	20	20	20
2	Terwujudnya tata kelola arsip OPD yang efektif dan Efisien	Nilai Audit Kearsipan	2. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan	b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	70	71	72	73	75
			3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lembaga Perpustakaan	c. Jumlah Perpustakaan yang dikelola sesuai Standar	Jumlah	-	-	-	2	2
			1. Meningkatkan Pencipta Arsip yang Tertib	a. Jumlah Pencipta Arsip yang tertib	Pencipta arsip	2	4	6	8	10
			2. Meningkatkan Penggunaan Sistem Kearsipan	b. Jumlah SKPD yang menggunakan Sistem Kearsipan	SKPD	-	-	2	2	2
			3. Meningkatkan Penyelamatan Arsip	c. Jumlah Arsip yang diselamatkan	Dokumen	-	-	2	2	2
3	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1. Meningkatkan tata kelola organisasi	a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Nilai	65	65	67	70	72
				b. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	%	85	87	-	-	-

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2021.

Tujuan perjanjian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 :

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dengan mengacu kepada rencana strategis tahun 2016-2021 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kunjungan Perpustakaan	a. % Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	20%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	b. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	75
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lembaga Perpustakaan	c. Jumlah Perpustakaan yang dikelola sesuai standar	2 Perpustakaan
4	Meningkatnya Pencipta Arsip yang tertib	d. Jumlah Pencipta Arsip yang tertib	10 Pencipta Arsip
5	Meningkatnya Penggunaan Sistem Kearsipan	e. Jumlah SKPD yang menggunakan sistem kearsipan	2 SKPD

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

6	Meningkatnya Penyelamatan Arsip	f. Jumlah Arsip yang diselamatkan	2 Dokumen
7	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	g. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (72)
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 13.593.686.487	APBD
2	Pengelolaan Arsip	Rp 447.257.850	APBD
3	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 223.133.650	APBD
4	Perizinan Penggunaan Arsip	Rp 20.000.000	APBD
5	Pembinaan Perpustakaan	Rp 1.192.723.300	APBD
6	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp 143.091.700	APBD
	Jumlah	Rp 15.619.892.987	

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.4
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kunjungan Perpustakaan	a. % Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	20%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	b. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	75
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lembaga Perpustakaan	c. Jumlah Perpustakaan yang dikelola sesuai standar	2 Perpustakaan
4	Meningkatnya Pencipta Arsip yang tertib	d. Jumlah Pencipta Arsip yang tertib	10 Pencipta Arsip
5	Meningkatnya Penggunaan Sistem Kearsipan	e. Jumlah SKPD yang menggunakan sistem kearsipan	1 SKPD
6	Meningkatnya Penyelamatan Arsip	f. Jumlah Arsip yang diselamatkan	2 Dokumen
7	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	g. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (72)
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 13.349.515.982	APBD
2	Pengelolaan Arsip	Rp 303.879.000	APBD
3	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 115.296.950	APBD
4	Perizinan Penggunaan Arsip	Rp 0	APBD
5	Pembinaan Perpustakaan	Rp 953.629.202	APBD
6	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp 119.091.700	APBD
	Jumlah	Rp 14.841.412.834	

2.2 Rencana Anggaran Tahun 2021

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan(Pembiayaan netto) maka jumlah Anggaran pada APBD perubahan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp. 14.841.412.834,-** yang digunakan untuk membiayai belanja urusan kearsipan, urusan perpustakaan dan urusan sekretariat. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Pagu Anggaran per Urusan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021

No	Uraian	Pagu (Rp)
1	Belanja Urusan	1.491.896.852
2	Belanja Non Urusan	13.349.515.982
Jumlah		14.841.412.834

Sumber Data : Subbag Keuangan

Alokasi anggaran belanja urusan tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Persentase Anggaran
1.	Meningkatnya kunjungan perpustakaan	1.072.720.902	7,23 %
2.	Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan		
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lembaga Perpustakaan		
4.	Meningkatnya Pencipta Arsip yang tertib	419.175.950	2,82 %
5.	Meningkatnya Penggunaan Sistem Kearsipan		
6.	Meningkatnya Penyelamatan Arsip		
7.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	13.349.515.982	89,95 %
Jumlah		14.841.412.834	100

Sumber data : Subbag Perencanaan

Pada tabel di atas pada anggaran untuk program/kegiatan sasaran strategis, dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi, dengan besaran anggaran Rp.13.349.515.982,- atau 89,95 % dari total pagu anggaran. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif kecil adalah adalah sasaran pada urusan perpustakaan sebesar Rp.1.072.720.902,- atau 7,23 % dari total pagu anggaran, dan sasaran dengan anggaran yang sangat kecil yaitu sasaran pada urusan kearsipan dengan anggaran sebesar Rp.419.175.950,- atau 2,82% dari total pagu anggaran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan tahun kelima dari Renstra 2016-2021. Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya yang telah disesuaikan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat 2016 - 2021.

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala penilaian capaian kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan LAKIP ini.

Tabel 3.1
Skala dan Kategori Capaian Kinerja

No	Skala Penilaian	Kategori Keberhasilan
1	85%-100%	Sangat Baik
2	75%-84%	Baik
3	56%-74%	Cukup
4	< 55%	Kurang

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2021. Adapun capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021 untuk setiap indikator

sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan yang dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Sumatera Barat

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kunjungan Perpustakaan	% peningkatan Kunjungan Perpustakaan	20 %	27,96	139,8
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	75 Nilai	84,93	113,26
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lembaga Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang dikelola sesuai standar	2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	100
4	Meningkatnya Pencipta Arsip yang Tertib	Jumlah Pencipta Arsip yang Tertib	10 Pencipta Arsip	10 Pencipta Arsip	100
5	Meningkatnya Penggunaan Sistem Kearsipan	Jumlah SKPD yang menggunakan sistem kearsipan	1 OPD	1 OPD	100
6	Meningkatnya Penyelamatan Arsip	Jumlah Arsip yang diselamatkan	2 dokumen	2 dokumen	100
7	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (72 Nilai)	73,95 Nilai	102.70

Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Utama 102,66

Dari tabel 3.2 dapat dilihat rata-rata capaian tujuh indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuh sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dengan tingkat capaian rata rata di atas 100 persen.

Secara keseluruhan indikator kinerja utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi kriteria sangat baik (85%-100%). Diantara realisasinya bahkan mencapai lebih dari 100% dari rencana kinerja yang ditargetkan. Dari gambar di bawah ini dapat dilihat persentase capaian keberhasilan indikator kinerja utama sebagai berikut;

3.3 Capaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja dengan menjelaskan dan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per tujuan dan sasaran strategis. Beberapa tujuan yang terkait digabungkan menjadi sasaran strategis dalam analisis ini.

Tujuan 1: Meningkatnya Gemar dan Budaya Membaca Masyarakat

Untuk pencapaian tujuan Meningkatnya Gemar dan Budaya Membaca Masyarakat telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kunjungan perpustakaan

Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk mengetahui kinerja perpustakaan adalah jumlah pengguna yang datang atau berkunjung ke perpustakaan selama periode tertentu, perhitungan biasanya dilakukan satu tahun. Hal tersebut juga menjadi dasar dalam menetapkan salah satu sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Untuk mengukur capaian sasaran strategis meningkatnya kunjungan perpustakaan, realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kunjungan Perpustakaan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kunjungan Perpustakaan	% Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	20 %	27,96%	139,8

(Sumber Data : Bidang Perpustakaan)

Realisasi dan capaian indikator kinerja Jumlah kunjungan perpustakaan tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020 karena adanya perubahan

indikator kinerja pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 ini indikator kinerja telah disesuaikan kembali sehingga dapat dibandingkan dengan tahun 2019.

Perubahan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sehingga Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam hal ini revisi terhadap indikator kinerja terhadap sasaran strategis pada tahun 2020 dengan indikator kinerja Meningkatnya kunjungan perpustakaan disebabkan karena munculnya Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*, yang membawa dampak signifikan berbagai aspek. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali terhadap pelayanan perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Namun pada Tahun 2021 indikator kinerja tersebut telah dikembalikan sesuai dengan indikator kinerja pada tahun sebelumnya.

Tabel 3.4
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja
Tahun 2019 s/d 2021

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			% CAPAIAN		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
% Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	20,02	-		100,03	-	
Jumlah Kunjungan Perpustakaan	-	39.576		-	192,88	
% Peningkatan Kunjungan Perpustakaan			27,96			139,8

Dari tabel dapat dilihat persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk tahun 2021 adalah sebesar 139,8 termasuk kategori sangat baik. Penghitungan realisasi indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

Jumlah kunjungan perpustakaan	Target Kunjungan 20 % peningkatan Kunjungan Perpustakaan dari Kunjungan Tahun 2020 (n-1) Target kunjungan untuk tahun 2021 adalah $20\% \times 39.576 = 7.915$ $39.576 + 7915 = 47.491$ Realisasi terhadap kunjungan tahun 2021 sebanyak 66.401 Persentase capaian = $\frac{66.401}{47.491} \times 100 = \mathbf{139,8\%}$
-------------------------------	--

Ket : Realisasi Jumlah kunjungan perpustakaan pada tahun 2021 = 66.401 orang

Dari capaian indikator kinerja Jumlah kunjungan perpustakaan sebesar 139,8% jelas terlihat bahwa capaian indikator kinerja ini termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh meningkatnya aktivitas masyarakat di Perpustakaan Umum Provinsi Sumatera Barat seperti kunjungan perpustakaan keliling serta minat baca yang cukup tinggi serta kunjungan dari masyarakat walaupun jumlah kunjungan dibatasi hanya 50 persen setiap harinya. Selain itu jumlah kunjungan juga dihitung dari kunjungan i-Sumbar Mambaco dan buku tamu elektronik. Secara keseluruhan dapat disimpulkan pada tahun 2021 dengan terbatasnya anggaran serta dibatasinya waktu dan jumlah pengunjung akibat mewabahnya virus covid 19, namun minat baca masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan tetap tinggi.

Analisis capaian kinerja pada indikator kinerja dengan jumlah kunjungan perpustakaan, data diperoleh dari jumlah kunjungan pada Perpustakaan Umum Provinsi, jumlah layanan pada perpustakaan keliling serta jumlah kunjungan pada web site, aplikasi -Sumbar mambaco serta kunjungan pemustaka pada buku tamu elektronik. Peningkatan jumlah kunjungan sebanyak 18.910 orang di atas dari target yang ditetapkan menggambarkan bahwa dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik dan banyaknya aktivitas masyarakat setiap hari di Perpustakaan dapat meningkatkan persentase kunjungan pada Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Data tersebut dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 3.5
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2021

No	Keterangan	Jumlah Pengunjung
1	Layanan Perpustakaan Umum	50.272
2	Layanan Perpustakaan Keliling	2.589
3	Layanan Melalui : ◆ Web site ◆ i-Sumbar Mambaco ◆ Buku Tamu Elektronik	13.530
	Total	66.401

Di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagai dasar dalam penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan tidak diatur mengenai pembatasan pelayanan publik, sebagaimana yang diterapkan oleh penyelenggara pelayanan publik pada saat terjadinya wabah virus corona (covid 19) saat ini. Tetapi berdasarkan undang-undang ini diatur bahwa penyelenggara pelayanan publik mempunyai kewajiban untuk memenuhi komponen standar pelayanan minimal seperti persyaratan, dasar hukum, sistem mekanisme prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya, produk layanan, dan lain-lain. Sehingga walaupun ada kebijakan pembatasan pelayanan publik tersebut, penyelenggara pelayanan publik tetap harus mematuhi standar pelayanan minimal dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak baik penyelenggara maupun masyarakat, sehingga walaupun terjadi pembatasan dalam pemberian pelayanan publik, tetapi penyelenggara masih memberikan pelayanan publik yang efektif dan prima kepada masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator jumlah kunjungan perpustakaan pada masa pandemi virus corona (covid 19) ini adalah dengan :

- ✧ Menyediakan informasi yang jelas dan terbaru melalui berbagai media akan sangat membantu masyarakat dalam mendapat kejelasan informasi agar tidak terjadi kerumunan massa di ruang pelayanan perpustakaan.
- ✧ Meningkatkan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Secara Online (dengan menambah jumlah buku elektronik)
- ✧ Adaptasi Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pelayanan. Sarana, prasarana dan fasilitas yang selama ini telah ada di lokasi pelayanan dengan memerlukan penyesuaian seperti menggunakan masker atau face shield, menerapkan social

distancing dengan memberikan jarak pada antrian maupun ruang tunggu, menyediakan handsanitizer/tempat cuci tangan serta melakukan sterilisasi secara rutin baik penyemprotan desinfektan maupun pembersihan pendingin ruangan secara rutin.

- ✧ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung agar masyarakat mau berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan.
- ✧ Meningkatkan fasilitas layanan perpustakaan dengan menambah kapasitas yang memadai bagi pengunjung, melengkapi koleksi berbagai koleksi terbaru yang update informasi dan mutakhir yang disusun secara sistematis bebas dari debu baik koleksi manual maupun elektronil (e-library), layanan internet gratis melalui free hotspot dengan jaringan wifi, dan fasilitas lainnya yang dapat membuat masyarakat minat datang ke perpustakaan.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya kunjungan perpustakaan ini yaitu

1. Program Pembinaan Perpustakaan dengan kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung sebagai berikut :

- Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat daerah Provinsi

Sub kegiatan :

- ✧ Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
- ✧ Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
- Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi

Sub kegiatan :

- ✧ Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
- ✧ Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
- ✧ Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

2. Meningkatnya Kualitas Layanan

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan perpustakaan, realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Layanan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	75 Nilai	84,93	113,24 %

(Sumber Data : Bidang Perpustakaan)

Dari tabel dapat dilihat rata-rata capaian indikator Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) adalah sebesar 113,24 termasuk kategori sangat baik. Penghitungan realisasi indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

Dasar Perhitungan :

Realisasi = Hasil Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat

% Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$= \frac{84,93}{75} \times 100\%$$

$$= 113,24\%$$

Berdasarkan realisasi dari indikator kinerja yang dijadikan alat ukur untuk pencapaian sasaran strategis meningkatkan kualitas layanan yang prima, transparan, aspiratif dan partisipatif dalam mewujudkan sasaran strategis ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah berhasil dengan baik.

Realisasi dan capaian indikator kinerja Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) tahun 2021 dapat dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun 2020, untuk perbandingan jumlah kunjungan perpustakaan pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.7 dibawah ini:

Tabel 3.7
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja
Tahun 2019 s/d 2021

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			% CAPAIAN		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	81,143	81,143	84,93	112,6	111,15	113,24

Didalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/2/ 2004 tanggal 24 Februari tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintahan yang digunakan sebagai acuan bagi unit pelayanan instansi pemerintah dalam menyusun indeks kepuasan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) itu sendiri merupakan data dan informasi tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Bagi masyarakat, indeks kepuasan masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan. Dengan tersedianya data IKM secara periodik, maka dapat diperoleh manfaat sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 sebagai berikut:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan yang perlu diambil dan upaya yang diperlukan dilakukan;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup pemerintah pusat dan daerah;
5. Memicu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah pusat dan daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) adalah sebagai berikut :

A. Program Pembinaan Perpustakaan

- Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan di Tingkat daerah Provinsi

- ❖ Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
- ❖ Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi
- ❖ Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

B. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

- Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi
 - ❖ Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
- Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah
 - ❖ Penerbitan Katalog Induk Daerah
 - ❖ Penerbitan Bibliografi Daerah
- Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi
 - ❖ Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan

3. Meningkatnya Kualitas Lembaga Perpustakaan

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan perpustakaan, realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada berikut :

Tabel 3.8
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Perpustakaan yang dikelola sesuai standar

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lembaga Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang dikelola sesuai standar	2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	100 %

(Sumber Data : Bidang Pembinaan)

Dari tabel 3.8 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Jumlah Perpustakaan yang dikelola sesuai standar adalah sebesar 100%. Capaian ini termasuk kategori yang sangat baik. Penghitungan realisasi indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

Dasar Perhitungan :

Realisasi = Jumlah Perpustakaan yang dikelola sesuai standar

% Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$= \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Berdasarkan realisasi dari indikator kinerja yang dijadikan alat ukur untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lembaga Perpustakaan dalam mewujudkan sasaran strategis ini, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah berhasil dengan baik.

Realisasi dan capaian indikator kinerja Jumlah Perpustakaan yang dikelola sesuai standar tahun 2021 dapat dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun 2020. Hal ini karena indikator kinerja ini merupakan indikator yang ditetapkan pada Tahun 2019 sesuai dengan penyempurnaan cascading Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dan telah disesuaikan pada Renstra 2019.

Perpustakaan yang dikelola sesuai standar tersebut adalah :

1. Perpustakaan SMAN 1 Solok
2. SMAN 1 Lubuk Basung

Faktor pendukung tercapainya target indikator kinerja Jumlah Perpustakaan yang dikelola sesuai standar agar kualitas layanan dan pengelolaan perpustakaan semakin membaik adalah dengan peningkatan koleksi perpustakaan dan meningkatnya SDM tenaga perpustakaan

Faktor penghambat dalam pencapaian target indikator kinerja jumlah perpustakaan yang dikelola sesuai standar ini adalah terbatasnya koleksi di berbagai perpustakaan, sarana dan prasarana yang tidak memenuhi standar serta SDM pengelola yang tidak kompeten di bidangnya.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lembaga Perpustakaan adalah Program Pembinaan Perpustakaan dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
 - ❖ Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
 - ❖ Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
 - ❖ Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi
 - ❖ Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
 - ❖ Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

- ❖ Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
- Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
- ❖ Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi

Tujuan 2 “Terwujudnya Tata Kelola Arsip OPD yang Efektif dan Efisien”

Untuk pencapaian tujuan Terwujudnya Tata Kelola Arsip OPD yang Efektif dan Efisien pada semua OPD, Lembaga Kearsipan dan Perpustakaan Kab/Kota telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis. Hal ini ditetapkan pada Tahun 2018 sesuai dengan revisi terhadap cascading Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dan telah disesuaikan dengan revisi Renstra tahun 2018.

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Arsip OPD yang efektif dan Efisien dengan 3 target indikator pada tahun 2021 yaitu :

1. Meningkatnya Pencipta Arsip yang Tertib
2. Meningkatnya Penggunaan Sistem Kearsipan
3. Meningkatnya Penyelamatan Arsip

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pencipta Arsip yang Tertib

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di pemerintahan daerah harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara kearsipan Provinsi Sumatera Barat merupakan tanggung jawab pemerintahan Daerah Provinsi dan dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Provinsi Sumatera Barat khususnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi pembina terhadap pencipta arsip tingkat daerah dan perpanjangan tangan Gubernur sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pencipta arsip sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pemerintah daerah.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis meningkatnya penyelenggaraan kearsipan, realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pencipta Arsip yang Tertib

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Pencipta Arsip yang Tertib	Jumlah Pencipta Arsip yang Tertib	10 Pencipta Arsip	10 Pencipta Arsip	100

Sumber Data : Bidang Kearsipan

Dari tabel dapat dilihat capaian Jumlah Pencipta Arsip yang Tertib adalah sebesar 100% termasuk kategori sangat baik. Penghitungan realisasi indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

Dasar Perhitungan :

Realisasi = Jumlah Pencipta Arsip yang Tertib

% Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

= $\frac{10}{10} \times 100\%$

= 100%

Capaian kinerja tahun 2021 dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan kinerja dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja Tahun 2019 s/d 2021

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			% CAPAIAN		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Jumlah Pencipta Arsip yang Tertib	6 Pencipta Arsip	8 Pencipta Arsip	10 Pencipta Arsip	100%	100%	100%

Dari tabel tersebut dapat dilihat realisasi indikator kinerja jumlah pencipta arsip yang tertib ditetapkan 10 Instansi penyelenggara sesuai dengan target yang

ditetapkan dengan capaian 100 %. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung terlaksananya sasaran strategis tersebut antara lain :

A. Program Pengelolaan Arsip

- Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
 - ❖ Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
- Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
 - ❖ Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI

Dari kegiatan yang dilaksanakan ditetapkan pencipta arsip/OPD yang tertib arsip yang merupakan kategori penilaian sesuai standar kearsipan. Sepuluh OPD tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat
2. Inpektorat Provinsi Sumatera Barat
3. RSJ HB. Sa'anin Kota Padang
4. RSUD Kota Kota Solok
5. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat
6. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
9. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat
10. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

Penetapan OPD atau pencipta arsip yang tertib ada beberapa faktor yang mendukung kenapa SKPD tersebut mencapai keberhasilan yang baik dalam segi pengelolaan arsip dinamis, yaitu;

- a. Pelaksanaan pengelolaan surat masuk dan surat keluar telah terkelola dengan baik sesuai Pergub Provinsi Sumatera Barat Nomor 102 tahun 2014 tentang pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Sudah terlaksananya pengelolaan arsip vital, arsip aktif dan arsip in aktif sesuai dengan ketentuan dengan menyusun arsip atau pemberkasan arsip secara berkala ke dalam filling kabinet, boks arsip dan tempat penyimpanan arsip lainnya.

- c. Sarana dan prasarana serta peralatan kearsipan sudah memenuhi standar sesuai Pergub Provinsi Sumatera Barat nomor 114 tahun 2008 tentang pedoman penggunaan peralatan kearsipan di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
- d. Sudah tersedianya SDM yang mengelola arsip dengan latar belakang pendidikan atau telah mengikuti Bimtek Kearsipan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Pusat.

Disamping penyebab keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut, masih ada penyebab kegagalan dalam pencapaian indikator ini. Hal ini terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut :

- ◆ SDM Kearsipan
 - Minimnya jumlah arsiparis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga belum tentu setiap SKPD Provinsi memiliki SDM arsiparisnya.
 - Seringnya mutasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi termasuk arsiparis menyebabkan pekerjaan pengelolaan arsip banyak dilakukan dengan bukan orang yang mengerti tentang pengelolaan arsip tersebut.
- ◆ Arsip masih dipandang sebagai tumpukan kertas yang berdebu dan kotor oleh sebagian masyarakat sehingga arsip diperlakukan sekedar hasil samping (by product) dari kegiatan pemerintah sehingga arsip belum menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.
- ◆ Kurangnya kepedulian dan perhatian yang serius terhadap pentingnya kegiatan pengelolaan arsip hampir di seluruh jajaran organisasi sehingga lemahnya penegakan hukum terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan dalam mengelola arsip.
- ◆ Minimnya ruangan unit kearsipan yang dimiliki oleh SKPD Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- ◆ Minimnya sarana dan prasarana atau records center yang dimiliki SKPD untuk menyimpan arsip.

2. Meningkatnya Penggunaan Sistem Kearsipan

Meningkatnya Penggunaan Sistem Kearsipan dengan Indikator Kinerja Jumlah pencipta arsip yang menggunakan sistem kearsipan. Target kinerja untuk tahun 2021 ini adalah 1 OPD dengan realisasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Penggunaan Sistem Kearsipan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Penggunaan Sistem Kearsipan	Jumlah pencipta arsip yang menggunakan sistem kearsipan	1 OPD	1 OPD	100

Sumber Data : Bidang Pembinaan

Dari tabel 3.11 dapat dilihat capaian Jumlah pencipta arsip yang menggunakan sistem kearsipan adalah sebesar 100% termasuk kategori sangat baik. Penghitungan realisasi indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

Dasar Perhitungan :

Realisasi = Jumlah Pencipta Arsip yang menggunakan sistem kearsipan

% Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Target

$$= \frac{1}{1} \times 100 \%$$

$$= 100\%$$

Dari tabel di atas dapat dilihat capaian indikator kinerja jumlah pencipta arsip yang menggunakan sistem kearsipan adalah 100% termasuk kategori keberhasilan yang sangat baik, Untuk capaian kinerja tahun 2021 dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator kinerja ini telah ditetapkan menjadi sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat semenjak Tahun 2019 sesuai dengan penyempurnaan cascading Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dan telah disesuaikan pada Renstra 2019.

Tabel 3.12
Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2019 s/d 2021

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	%	CAPAIAN
-------------------	-----------	---	---------

	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Jumlah pencipta arsip yang menggunakan sistem kearsipan	2	1	1	100%	100%	100%

Berdasarkan perbandingan indikator kinerja Jumlah pencipta arsip yang menggunakan sistem kearsipan pada tiga tahun terakhir terdapat penurunan target pada tahun 2020 dan 2021. Penurunan target yang telah ditetapkan disebabkan adanya rasionalisasi anggaran terhadap kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja tersebut.

OPD yang ditetapkan sebagai pencipta arsip yang menggunakan sistem kearsipan adalah sebagai berikut :

- Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

Dalam melaksanakan penetapan indikator kinerja Jumlah pencipta arsip yang menggunakan sistem kearsipan ada beberapa penyebab keberhasilan dan strategi yang diterapkan dalam pencapaian target kinerja tersebut yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pembinaan kearsipan ke SKPD;
2. Meningkatkan kualitas pengembangan jabatan fungsional Arsiparis di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kearsipan dalam pengelolaan Arsip di SKPD masing-masing.

Disamping penyebab keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut, masih ada penyebab kegagalan dalam pencapaian indikator ini Hal ini terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut :

- Kurangnya SDM pengelola Kearsipan di SKPD.
- SDM pengelola kearsipan yang ada tidak/belum mengikuti diklat/bimbingan teknis kearsipan, baik yang dilaksanakan di daerah maupun ditingkat pusat.
- Sering terjadi mutasi sehingga SDM yang telah dibina tidak dapat melanjutkan kegiatan yang telah diberikan binaan.
- Tidak tersedianya peralatan kearsipan sesuai standard yang dianjurkan (Pergub Nomor 114 Tahun 2008, Tentang Pedoman Penggunaan Peralatan Kearsipan Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat).

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Jumlah pencipta arsip yang menggunakan sistem kearsipan adalah sebagai berikut :

A. Program Pengelolaan Arsip

- Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
 - ❖ Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
 - ❖ Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi

3. Meningkatnya Penyelamatan Arsip

Sasaran strategis Meningkatnya Penyelamatan Arsip dengan indikator kinerja Jumlah Arsip yang diselamatkan memiliki target kinerja 2 dokumen arsip yaitu :

1. Penyusunan daftar arsip terjaga SKPD dilakukan pada SKPD yang memiliki arsip terjaga yaitu :
 - ❖ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
 - ❖ Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
 - ❖ Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat
 - ❖ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
 - ❖ Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Akuisisi Arsip Negara Periode Tahun 2014 s/d 2019 (periode Jokowi 1) dilakukan terhadap 9 SKPD di yaitu :
 - ❖ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
 - ❖ Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat
 - ❖ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
 - ❖ Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
 - ❖ Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat
 - ❖ Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat
 - ❖ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
 - ❖ Biro Perekonomian
 - ❖ Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Penggunaan Sistem Kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelamatan Arsip

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
----	---------	-----------	--------	-----------	---------

	STRATEGIS	KINERJA			(%)
1	Meningkatnya Penyelamatan Arsip	Jumlah Arsip yang diselamatkan	2 dokumen	2 dokumen	100

Sumber data : Bidang Kearsipan

Dari tabel 3.13 dapat dilihat rata-rata capaian Jumlah Arsip yang diselamatkan adalah sebesar 100 % termasuk kategori sangat baik. Penghitungan realisasi indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

Dasar Perhitungan :

Realisasi = Jumlah Arsip yang diselamatkan

% Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$= \frac{2}{2} \times 100$$

$$= 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2021 dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Jumlah Arsip yang Diselamatkan Tahun 2019 s/d 2021

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			% CAPAIAN		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Jumlah Arsip yang diselamatkan	2	1	2	100%	100%	100%

Dalam melaksanakan penetapan indikator Jumlah Arsip yang diselamatkan ada beberapa penyebab keberhasilan dan strategi yang diterapkan dalam pencapaian target kinerja tersebut yaitu :

- ✧ Meningkatnya kepedulian tentang perlindungan dan penyelamatan arsip bencana oleh pegawai dari lembaga kearsipan Kabupaten/Kota dan SKPD Provinsi Sumbar yang dikunjungi
- ✧ Meningkatnya Pengelolaan arsip secara lengkap yang mempermudah pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengakses informasi kearsipan
- ✧ Meningkatnya kepedulian pemerintah dalam penyimpanan arsip sehingga penataan dan penyimpanan arsip sesuai dengan prosedur kearsipan. •

Disamping penyebab keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut, masih ada penyebab kegagalan dalam pencapaian indikator ini. Hal ini terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan repro terutama sarana repro arsip photo yang pada saat ini belum sesuai dengan kebutuhan.
- b. Belum optimalnya sistem penyelenggaraan kearsipan, mekanisme serta sistem penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah.
- c. Belum diterapkannya teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung penyelamatan arsip

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya penyelamatan arsip ini adalah sebagai berikut :

A. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

- Kegiatan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
 - ❖ Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
- Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi
 - ❖ Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan, dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana
 - ❖ Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana
- Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota
 - ❖ Sub Kegiatan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi
- Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi
 - ❖ Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

B. Program Pengelolaan Arsip

- Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
 - ❖ Sub Kegiatan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis

Tujuan3 “ Meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan yang ditunjang oleh pembinaan administrasi dan keuangan”

Untuk pencapaian tujuan meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan yang ditunjang oleh pembinaan administrasi dan keuangan telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis. Untuk mengukur capaian sasaran strategis tersebut realisasi dan capaian indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan tata kelola organisasi

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (72)	BB (73,95)	102,7

Sumber data : Sub Bagian Perencanaan

Dari tabel diatasdapat dilihat rata-rata capaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja adalah sebesar 102,7 termasuk kategori sangat baik. Penghitungan realisasi indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

Dasar Perhitungan :

Realisasi = Hasil Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

% Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$= \frac{73,95}{72} \times 100\%$$

$$= 102,7 \%$$

Target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 102,7%.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun 2019 s/d 2021

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			% CAPAIAN		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	66,84	70,76	73,95	99,76	101,08	102,7

Sumber data : Sub Bagian Perencanaan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 101,08%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, diketahui bahwa capaian indikator kinerja pada tahun 2019 adalah 99,76%, tahun 2020 tingkat capaian 101,08 % dan pada Tahun 2021 adalah 102,7 % yang berarti ada peningkatan secara signifikan setiap tahunnya.

Realisasi indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja ini diukur berdasarkan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja SKPD di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, Biro Organisasi dengan jajarannya di tahun 2021. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.17
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	25,58
2	Pengukuran Kinerja	25	18,13
3	Pelaporan Kinerja	15	12,41
4	Evaluasi Internal	10	5,70
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	12,14
NILAI HASIL EVALUASI		100	73,96

Dari tabel 3.17 dapat dilihat, realisasi indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2019 s/d 2021 menunjukkan peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya. hal ini disebabkan adanya peningkatan komponen nilai/bobot penilaian pada Lakip tahun 2021 yang mempengaruhinya yaitu sebagai berikut:

- Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah telah disusun dengan memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan ukuran keberhasilan. Perjanjian Kinerja telah selaras dengan Renstra dan telah dimanfaatkan untuk penyusunan kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.
- Renstra dan Perjanjian Kinerja telah dipublikasikan melalui website dap dan sumbarprov.go.id
- Indikator Kinerja Utama (IKU) telah memenuhi kriteria baik dan telah berorientasi hasil (outcome) serta telah dipublikasikan melalui website.dap.sumbarprov.go.id
- Telah terdapat ukuran (indikator) kinerja tingkat eselon III dan IV memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan telah selaras dengan indikator kinerja atasannya.
- Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya.
- Laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja telah disusun dan disampaikan tepat waktu.
- Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan dan telah terdapat penilaian atas seluruh aksi yang dilakukan.
- Target kinerja telah tercapai seluruhnya dengan sesuai dengan target yang ditetapkan

Peningkatan kinerja dapat ditingkatkan dengan memenuhi kriteria penilaian yang lebih baik untuk tahun selanjutnya. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah :

- Rencana aksi yang mencantumkan target kinerja secara periodik atas kinerja agar dapat dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan serta dimonitor pencapaiannya secara berkala
- Target kinerja yang diperjanjikan agar digunakan untuk mengukur dan menyimpulkan keberhasilan.
- Pengukuran kinerja agar dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi sehingga capaian atau progress kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat.
- Laporan kinerja agar dapat menyajikan perbandingan realisasi atau capaian organisasi /instansi sejenis, setara atau sekelas.

- Laporan kinerja agar menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumberdaya secara lebih mendetail sehingga besaran efisiensi yang terjadi dapat dikuantifikasi, bukan hanya info tentang efisiensi yang telah dilakukan.
- Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi agar mencantumkan kesimpulan dan keberhasilan dari rencana/agenda
- Hasil evaluasi agar disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.

3.4 Akuntabilitas Anggaran

3.4.1 Realisasi Anggaran Tahun 2021

Pagu Anggaran belanja langsung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam DPA Tahun 2021 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian Kinerja sebesar Rp 14.841.412.834,-. Pagu tersebut dilaksanakan untuk membiayai 5 (lima) program yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Dari pagu anggaran tersebut, untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar Rp. 13.544.978.150,- sehingga persentase daya serap sampai Desember 2021 adalah sebesar 91,26 %.

Adapun Anggaran dan realisasi belanjatahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.18
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 Per Sasaran
(Berdasarkan APBD Perubahan 2021)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	(Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Meningkatnya kunjungan perpustakaan	Jumlah kunjungan perpustakaan	20%	27,96%	139,8%	1.072.720.902	954.713.788	89
2	Meningkatnya Kualitas Layanan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	75 Nilai	84,93 Nilai	113,26%			
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lembaga Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang dikelola sesuai standar	2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	100			
4	Meningkatnya Pencipta Arsip yang Tertib	Jumlah Pencipta Arsip yang Tertib	10 Pencipta Arsip	10 Pencipta Arsip	100	419.175.950	390.807.775	93,23
5	Meningkatnya Penggunaan Sistem Kearsipan	Jumlah pencipta arsip yang menggunakan sistem kearsipan	1 OPD	1 OPD	100			

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

6	Meningkatnya Penyelamatan Arsip	Jumlah Arsip yang diselamatkan	2 dokumen	2 dokumen	100			
7	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (72 Nilai)	BB (73,95 Nilai)	102,70	13.349.515.982	12.199.456.587	91,39

Realisasi kinerja keuangan pada 5 (lima) program di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19
Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2021
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
	TOTAL	14.841.412.834,00	13.544.978.150,99	91.26	
I	Program Pembinaan Perpustakaan	953.629.202,00	866.251.448,00	90.84	100
1	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	847.421.750,00	773.648.648,00	91.29	100
1.1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	288.708.550,00	281.303.790,00	97.44	100
1.2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	222.810.700,00	179.937.382,00	80.76	100
1.3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	34.000.000,00	26.296.500,00	77.34	100
1.4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	20.804.600,00	19.163.849,00	92.11	100
1.5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	1.305.500,00	1.112.900,00	85.25	100
1.6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	19.876.300,00	16.974.900,00	85.40	100
1.7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	25.435.700,00	20.844.275,00	81.95	100
1.8	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	206.992.400,00	202.086.760,00	97.63	100
1.9	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	27.488.000,00	25.928.292,00	94.33	100
2	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	106.207.452,00	92.602.800,00	87.19	100
2.1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	47.192.952,00	40.956.500,00	86.79	100
2.2	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	26.450.000,00	22.539.500,00	85.22	100

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

2.3	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	31.860.000,00	28.608.800,00	89.80	100
2.4	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	704.500,00	498.000,00	70.69	100
II	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	119.091.700,00	88.462.340,00	74.28	100
1	Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	41.082.700,00	25.186.990,00	61.31	100
1.1	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	41.082.700,00	25.186.990,00	61.31	100
2	Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	28.009.000,00	18.790.250,00	67.09	100
2.1	Penerbitan Katalog Induk Daerah	13.670.000,00	10.729.750,00	78.49	100
2.2	Penerbitan Bibliografi Daerah	14.339.000,00	8.060.500,00	56.21	100
3	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	50.000.000,00	44.485.100,00	88.97	100
3.1	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kunoyang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	50.000.000,00	44.485.100,00	88.97	100
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.349.515.982,00	12.199.456.587,99	91.39	100
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.517.600,00	101.072.300,00	83.87	100
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.290.650,00	29.472.550,00	85.95	100
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.129.100,00	45.213.300,00	82.01	100
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.097.850,00	26.386.450,00	84.85	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.611.167.682,00	8.932.843.818,00	92.94	100
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.260.634.682,00	8.673.341.818,00	93.66	100
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	252.240.000,00	183.990.000,00	72.94	100
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60.711.000,00	38.590.000,00	63.56	100
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	37.582.000,00	36.922.000,00	98.24	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.526.000,00	8.751.750,00	64.70	100
3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.612.000,00	5.790.000,00	67.23	100
3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.914.000,00	2.961.750,00	60.27	100
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.500.000,00	62.776.800,00	90.33	100
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	64.500.000,00	58.992.000,00	91.46	100
4.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000,00	3.784.800,00	75.70	100

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	370.256.340,00	354.330.100,00	95.70	100
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.682.650,00	9.606.500,00	99.21	100
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.530.000,00	14.467.500,00	99.57	100
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.750.000,00	53.851.000,00	88.64	100
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.125.790,00	27.119.500,00	99.98	100
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60.210.000,00	59.664.000,00	99.09	100
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.149.900,00	180.026.600,00	95.68	100
5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.808.000,00	9.595.000,00	97.83	100
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	570.573.932,00	490.951.200,00	86.05	100
6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.900.032,00	3.900.000,00	99.99	100
6.2	Pengadaan Mebel	500.000.000,00	420.645.200,00	84.13	100
6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.673.900,00	66.406.000,00	99.60	100
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.337.427.060,00	2.024.539.308,99	86.61	100
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.200.000,00	8.700.000,00	85.29	100
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	567.636.600,00	530.471.421,00	93.45	100
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.759.590.460,00	1.485.367.887,99	84.42	100
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.547.368,00	224.191.311,00	87.39	100
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121.869.768,00	105.258.600,00	86.37	100
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.000.000,00	26.700.000,00	95.36	100
8.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	106.677.600,00	92.232.711,00	86.46	100
IV	Program Pengelolaan Arsip	303.879.000,00	287.790.625,00	94.71	100
1	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	52.855.400,00	51.695.100,00	97.80	100
1.1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	41.374.900,00	40.681.600,00	98.32	100
1.2	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	11.480.500,00	11.013.500,00	95.93	100
2	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	133.225.100,00	129.301.875,00	97.06	100
2.1	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	11.000.000,00	10.104.250,00	91.86	100
2.2	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	122.225.100,00	119.197.625,00	97.52	100
3	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional	117.798.500,00	106.793.650,00	90.66	100

	Tingkat Provinsi				
3.1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	19.258.100,00	13.228.900,00	68.69	100
3.2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	98.540.400,00	93.564.750,00	94.95	100
V	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	115.296.950,00	103.017.150,00	89.35	100
1	Kegiatan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi dibawah 10 Tahun	72.401.750,00	63.873.150,00	88.22	100
1.1	Penilaian, Penetapan, dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	72.401.750,00	63.873.150,00	88.22	100
2	Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	30.578.100,00	27.378.300,00	89.54	100
2.1	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	13.846.200,00	13.171.550,00	95.13	100
2.2	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	16.731.900,00	14.206.750,00	84.91	100
3	Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	7.008.650,00	6.760.450,00	96.46	100
3.1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	7.008.650,00	6.760.450,00	96.46	100
4	Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	5.308.450,00	5.005.250,00	94.29	100
4.1	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	5.308.450,00	5.005.250,00	94.29	100

Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 termasuk kategori keberhasilan sangat baik dengan persentase capaian fisik 100% dan keuangan 91,26 %. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh :

- a. Komitmen pimpinan dan jajarannya dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
- b. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) terhadap perencanaan anggaran dan penatausahaan pertanggungjawaban realisasi fisik dan keuangan.
- c. Penerapan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menargetkan laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) paling lambat

tanggal 25 tiap bulannya sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan setiap bulan.

Upaya untuk mempertahankan pencapaian indikator kinerja persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan rekonsiliasi pendapatan, belanja dan pembiayaan lainnya secara konsisten sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Bidang Akuntansi dan BUD pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.
- b. Melaksanakan rekonsiliasi aset tetap dan lainnya yang dijadwalkan oleh Biro Pengelolaan Aset Daerah, Bidang akuntansi dan instansi lainnya berkaitan dengan pelaksanaan dan pelaporan aset secara berkala.
- c. Melaksanakan review laporan keuangan secara berkala (triwulan, semester dan tahunan).

3.4.2 ANALISIS EFISIENSI TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN DAN SDM

Dalam pelaksanaannya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dituntut untuk seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya baik yang berupa anggaran, sarana prasarana penunjang pekerjaan maupun sumber daya manusianya dan diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Dengan adanya pandemi covid 19 di seluruh dunia termasuk Indonesia, maka pada Tahun 2021 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat melakukan refocusing anggaran dan perubahan target kinerja kegiatan.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan program, kegiatan, tujuan sasaran yang telah ditetapkan dalam indikator Kinerja atau Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (Anggaran), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang hampir tercapai keseluruhan. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan terdapat efisiensi penggunaan anggaran masing masing program. Efisiensi anggaran ini antara lain terdapat pada :

1. Efisiensi pada perjalanan dinas.
2. Efisiensi karena adanya perbedaan harga antara standarisasi barang dan jasa dengan harga pasar yang berlaku.
3. Efisiensi pada belanja makan dan minum kegiatan
4. Efisiensi belanja BBM

Efisiensi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.20
Analisis Efisiensi Terhadap Penggunaan Anggaran dan SDM

Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Realisasi	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran	Keterangan
					Rp	%		
PENDAPATAN (DENDA KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN PINJAMAN BUKU)				5,000,000.00	4,957,500.00	99.15	42,500.00	
TOTAL				14,841,412,834.00	13,544,978,150.99	91.26	1,296,434,683.01	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				1,072,720,902.00	954,713,788.00	89.00	118,007,114.00	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				953,629,202.00	866,251,448.00	90.84	87,377,754.00	
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi				847,421,750.00	773,648,648.00	91.29	73,773,102.00	
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	- Jumlah basis data koleksi perpustakaan yang dientri - Jumlah koleksi buku e- book perpustakaan - Jumlah komputer untuk jaringan otomasi - Jumlah perpustakaan digital - Pemeliharaan jaringan layanan elektronik	- 3000 Eksemplar - 1 Paket Koleksi - 2 Unit - 3 Lokasi - 1 Jaringan	- 3000 Eksemplar - 1 Paket Koleksi - 0 Unit - 2 Lokasi - 1 Jaringan	288,708,550.00	281,303,790.00	97.44	7,404,760.00	Adanya target Sub Kegiatan yang tidak terlaksana akibat rasionalisasi
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	- Jumlah laporan hasil survey - Jumlah lokasi yang dapat dikunjungi oleh pustaka keliling - Jumlah pengunjung perpustakaan - Terlaksananya orientasi perpustakaan - Tersedianya Perda Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat	- 2 Laporan Survey - 42 Titik Keramaian - 38000 Orang - 17 Kegiatan - 1 Perda Perpustakaan	- 2 Laporan Survey - 30 Titik Keramaian - 66401 Orang - 0 Kegiatan - 1 Perda Perpustakaan	222,810,700.00	179,937,382.00	80.76	42,873,318.00	Adanya target Sub Kegiatan yang tidak terlaksana akibat rasionalisasi
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Tersedia informasi koleksi khasnya Provinsi Sumatera Barat	125 Eksemplar	125 Eksemplar	34,000,000.00	26,296,500.00	77.34	7,703,500.00	Telah terlaksana sesuai target
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan Kab/Kota yang dibina	6 Perpustakaan	9 Perpustakaan	20,804,600.00	19,163,849.00	92.11	1,640,751.00	Telah terlaksana sesuai target

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan kab/kota yang dibina	0 Perpustakaan	0 Perpustakaan	1,305,500.00	1,112,900.00	85.25	192,600.00	Telah terlaksana sesuai target
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya penilaian kinerja perpustakaan	25 PAK	25 PAK	19,876,300.00	16,974,900.00	85.40	2,901,400.00	Telah terlaksana sesuai target
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terjalannya Kerjasama Dengan SKPD Provinsi Dalam Pengembangan Dan Pengelolaan Perpustakaan	10 Kab/Kota dan Laporan	9 SKPD	25,435,700.00	20,844,275.00	81.95	4,591,425.00	Telah terlaksana sesuai target
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka dalam bentuk buku	1700 Eksemplar	1700 Eksemplar	206,992,400.00	202,086,760.00	97.63	4,905,640.00	Telah terlaksana sesuai target
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya data dan informasi perpustakaan dan pustakawan/pengelola perpustakaan	1 Buku data informasi	1 Buku data informasi	27,488,000.00	25,928,292.00	94.33	1,559,708.00	Telah terlaksana sesuai target
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi				106,207,452.00	92,602,800.00	87.19	13,604,652.00	
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	- Jumlah event yang diikuti - terlaksananya layanan sahabat perpustakaan dari berbagai kelompok masyarakat dalam waktu khusus	- 1 Event - 4 Kelompok	- 1 Event - 4 Kelompok	47,192,952.00	40,956,500.00	86.79	6,236,452.00	Telah terlaksana sesuai target
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Terlaksananya pemberian penghargaan anugerah literasi dan stakeholder meeting	6 Penghargaan	5 Penghargaan	26,450,000.00	22,539,500.00	85.22	3,910,500.00	Adanya target Sub Kegiatan yang tidak terlaksana akibat rasionalisasi
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya kegiatan perkampungan literasi	2 Lokasi	2 Lokasi	31,860,000.00	28,608,800.00	89.80	3,251,200.00	Telah terlaksana sesuai target
Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya duta baca	1 Orang duta terbaik	0 Orang duta terbaik	704,500.00	498,000.00	70.69	206,500.00	Adanya target Sub Kegiatan yang tidak terlaksana akibat rasionalisasi
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				119,091,700.00	88,462,340.00	74.28	30,629,360.00	
Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi				41,082,700.00	25,186,990.00	61.31	15,895,710.00	

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	- Jumlah bahan perpustakaan yang terhimpun, terkelola dan terpeliharanya koleksi KCKR - Tersusun dan terhimpunnya KCKR	- 750 eksemplar - 1 Kegiatan	- 500 eksemplar - 1 Kegiatan	41,082,700.00	25,186,990.00	61.31	15,895,710.00	Adanya target Sub Kegiatan yang tidak terlaksana akibat rasionalisasi
Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah				28,009,000.00	18,790,250.00	67.09	9,218,750.00	
Penerbitan Katalog Induk Daerah	- Terlaksananya penerbitan Katalaog Induk Daerah Provinsi Sumatera Barat - Terlaksananya penggandaan Katalog Induk Daerah Provinsi Sumatera Barat	- 1 Terbitan - 100 Eksemplar	- 1 Terbitan - 60 Eksemplar	13,670,000.00	10,729,750.00	78.49	2,940,250.00	Adanya target Sub Kegiatan yang tidak terlaksana akibat rasionalisasi
Penerbitan Bibliografi Daerah	- Terlaksananya penerbit literatur sekunder - Terlaksananya penggandaan Bibliografi Induk Daerah Provinsi Sumatera Barat	- 1 Terbitan - 100 Eksemplar	- 1 Terbitan - 60 Eksemplar	14,339,000.00	8,060,500.00	56.21	6,278,500.00	Adanya target Sub Kegiatan yang tidak terlaksana akibat rasionalisasi
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi				50,000,000.00	44,485,100.00	88.97	5,514,900.00	
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	- Dimanfaatkannya Layanan naskah kuno oleh masyarakat Sumatera Barat - Terlestarinya dan dimanfaatkannya naskah kuno oleh masyarakat Sumatera Barat	- 720 orang - 400 Lembar	- 720 Orang - 408 Lembar	50,000,000.00	44,485,100.00	88.97	5,514,900.00	Telah terlaksana sesuai target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				13,768,691,932.00	12,590,264,362.99	91.44	1,178,427,569.01	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				13,349,515,982.00	12,199,456,587.99	91.39	1,150,059,394.01	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				120,517,600.00	101,072,300.00	83.87	19,445,300.00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan yang disusun (Renstra, Renja, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan)	6 Dokumen	6 Dokumen	34,290,650.00	29,472,550.00	85.95	4,818,100.00	Telah terlaksana sesuai target
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan (Forum Perangkat Daerah)	1 Kali	1 Kali	55,129,100.00	45,213,300.00	82.01	9,915,800.00	Telah terlaksana sesuai target

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (Evaluasi Kinerja, LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Tahunan)	5 Dokumen	5 Dokumen	31,097,850.00	26,386,450.00	84.85	4,711,400.00	Telah terlaksana sesuai target
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9,611,167,682.00	8,932,843,818.00	92.94	678,323,864.00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang dibayarkan dalam 1 Tahun	86 Orang	80 Orang	9,260,634,682.00	8,673,341,818.00	93.66	587,292,864.00	Telah terlaksana sesuai target
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jasa Administrasi Keuangan (Pengelola Keuangan, Pengelola Barang Milik Daerah, Pengelola Sistem Informasi, Petugas PPHPK)	12 Bulan	12 Bulan	252,240,000.00	183,990,000.00	72.94	68,250,000.00	Telah terlaksana sesuai target
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan SKPD pada akhir tahun	1 Laporan	1 Laporan	60,711,000.00	38,590,000.00	63.56	22,121,000.00	Telah terlaksana sesuai target
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan SKPD bulanan/triwulan/semesteran	2 Laporan	2 Laporan	37,582,000.00	36,922,000.00	98.24	660,000.00	Telah terlaksana sesuai target
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				13,526,000.00	8,751,750.00	64.70	4,774,250.00	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	8,612,000.00	5,790,000.00	67.23	2,822,000.00	Telah terlaksana sesuai target
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4,914,000.00	2,961,750.00	60.27	1,952,250.00	Telah terlaksana sesuai target
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				69,500,000.00	62,776,800.00	90.33	6,723,200.00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	86 Stel	80 Stel	64,500,000.00	58,992,000.00	91.46	5,508,000.00	Telah terlaksana sesuai target
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	3,784,800.00	75.70	1,215,200.00	Telah terlaksana sesuai target
Administrasi Umum Perangkat Daerah				370,256,340.00	354,330,100.00	95.70	15,926,240.00	

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	9,682,650.00	9,606,500.00	99.21	76,150.00	Telah terlaksana sesuai target
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	14,530,000.00	14,467,500.00	99.57	62,500.00	Telah terlaksana sesuai target
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Alat tulis kantor yang disediakan - Makanan dan minuman yang disediakan untuk pertemuan dan tamu - Penyediaan bahan logistik kantor	- 12 Bulan - 12 Bulan - 12 Bulan	- 12 Bulan - 12 Bulan - 12 Bulan	60,750,000.00	53,851,000.00	88.64	6,899,000.00	Telah terlaksana sesuai target
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	27,125,790.00	27,119,500.00	99.98	6,290.00	Telah terlaksana sesuai target
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	60,210,000.00	59,664,000.00	99.09	546,000.00	Telah terlaksana sesuai target
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	188,149,900.00	180,026,600.00	95.68	8,123,300.00	Telah terlaksana sesuai target
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya arsip pada SKPD	12 Bulan	12 Bulan	9,808,000.00	9,595,000.00	97.83	213,000.00	Telah terlaksana sesuai target
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				570,573,932.00	490,951,200.00	86.05	79,622,732.00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas/operasional pejabat yang dipelihara	1 Unit	0 Unit	3,900,032.00	3,900,000.00	100.00	32.00	Adanya target Sub Kegiatan yang tidak terlaksana akibat rasionalisasi
Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur	20 Jenis	20 Jenis	500,000,000.00	420,645,200.00	84.13	79,354,800.00	Telah terlaksana sesuai target
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Unit	4 Unit	66,673,900.00	66,406,000.00	99.60	267,900.00	Telah terlaksana sesuai target
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,337,427,060.00	2,024,539,308.99	86.61	312,887,751.01	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang didistribusikan	12 Bulan	12 Bulan	10,200,000.00	8,700,000.00	85.29	1,500,000.00	Telah terlaksana sesuai target

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening tagihan yang dibayarkan (Listrik , Air , Telpn, Internet)	12 Bulan	12 Bulan	567,636,600.00	530,471,421.00	93.45	37,165,179.00	Telah terlaksana sesuai target
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jasa Kebersihan Kantor, Jasa Pengamanan Kantor, Jasa Sopir Kantor, Honor PTT - Jasa Kesehatan Jasmani (Senam Mingguan), Jasa Kesehatan Rohani (Wirid Mingguan, Program Ramadhan), Jasa Rohaniawan, Dukungan Penerapan New Normal	- 12 Bulan - 12 Bulan	- 12 Bulan - 12 Bulan	1,759,590,460.00	1,485,367,887.99	84.42	274,222,572.01	Telah terlaksana sesuai target
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				256,547,368.00	224,191,311.00	87.39	32,356,057.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	11 Unit	11 Unit	121,869,768.00	105,258,600.00	86.37	16,611,168.00	Telah terlaksana sesuai target
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan komputerisasi	50 Unit	50 Unit	28,000,000.00	26,700,000.00	95.36	1,300,000.00	Telah terlaksana sesuai target
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan lainnya	12 Bulan	12 Bulan	106,677,600.00	92,232,711.00	86.46	14,444,889.00	Telah terlaksana sesuai target
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				303,879,000.00	287,790,625.00	94.71	16,088,375.00	
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi				52,855,400.00	51,695,100.00	97.80	1,160,300.00	
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	- Daftar arsip yang dipindahkan - Terlaksananya penyusutan arsip dinamis SKPD dari Unit Pengolah (UP) ke Unit Kearsipan (UK)	- 4 Daftar - 4 SKPD	- 4 Daftar - 4 SKPD	41,374,900.00	40,681,600.00	98.32	693,300.00	Telah terlaksana sesuai target
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Tata Kelola Kearsipan Pada SKPD Provinsi	5 SKPD	5 SKPD	11,480,500.00	11,013,500.00	95.93	467,000.00	Telah terlaksana sesuai target
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi				133,225,100.00	129,301,875.00	97.06	3,923,225.00	
Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Terlaksananya pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga	5 Daftar	5 Daftar	11,000,000.00	10,104,250.00	91.86	895,750.00	Telah terlaksana sesuai target

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	- Bertambahnya jumlah koleksi kasanah arsip statis yang diakuisisi - Terlaksananya layanan preservasi (enkapsulasi) arsip masyarakat - Terpeliharanya dan terlestarikannya arsip-arsip media baru - Terpeliharanya dan terlestarikannya arsip peta - Terpeliharanya data dan fisik arsip statis	- 9 SKPD - 5 Kab/Kota - 45 Alih Media - 45 Lembar - 200 Boks	- 49 SKPD - 5 Kab/Kota - 0 Alih Media - 45 Lembar - 200 Boks	122,225,100.00	119,197,625.00	97.52	3,027,475.00	Adanya target Sub Kegiatan yang tidak terlaksana akibat rasionalisasi
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi				117,798,500.00	106,793,650.00	90.66	11,004,850.00	
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Adanya simpul jaringan dan informasi kearsipan	3 Simpul	3 Simpul	19,258,100.00	13,228,900.00	68.69	6,029,200.00	Telah terlaksana sesuai target
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	- Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan arsip vital dan arsip terjaga (arsip aset) - Terlaksananya dan terpantaunya penilaian kinerja arsiparis - Terlaksananya pembinaan kualitas dan wawasan fungsional arsiparis	- 30 Orang - 40 Orang - 50 Arsiparis - 50 Arsiparis Se-Sumbar	- 30 Orang - 40 Orang - 50 Arsiparis SKPD Provinsi dan Kab/Kota	98,540,400.00	93,564,750.00	94.95	4,975,650.00	Telah terlaksana sesuai target
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				115,296,950.00	103,017,150.00	89.35	12,279,800.00	
Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun				72,401,750.00	63,873,150.00	88.22	8,528,600.00	
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Terlaksananya penilaian arsip dengan retensi dibawah 10 tahun	4 SKPD	4 SKPD	72,401,750.00	63,873,150.00	88.22	8,528,600.00	Telah terlaksana sesuai target
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi				30,578,100.00	27,378,300.00	89.54	3,199,800.00	

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan, dan Penyimpanan Akibat Bencana	- Terlaksananya simulasi perlindungan dan penyelamatan arsip bencana - Terlaksananya simulasi perlindungan dan penyelamatan arsip bencana	- 6 SLTA - 2 SKPD	- 0 SLTA - 3 SKPD	13,846,200.00	13,171,550.00	95.13	674,650.00	Adanya target Sub Kegiatan yang tidak terlaksana akibat rasionalisasi
Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Terlaksananya pemulihan dan penyimpanan arsip bencana	4 Kabupaten/kota	0 Kabupaten/kota	16,731,900.00	14,206,750.00	84.91	2,525,150.00	Adanya target Sub Kegiatan yang tidak terlaksana akibat rasionalisasi
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota				7,008,650.00	6,760,450.00	96.46	248,200.00	
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Terlaksananya pendataan arsip bagi perangkat daerah provinsi yang digabung	3 SKPD	6 SKPD	7,008,650.00	6,760,450.00	96.46	248,200.00	Telah terlaksana sesuai target
Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi				5,308,450.00	5,005,250.00	94.29	303,200.00	
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terautentikasinya arsip yang sah	2000 lembar	0 Lembar	-	-		-	
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terpeliharanya dan terlestarikannya arsip media baru	3000 lembar	2500 Lembar	5,308,450.00	5,005,250.00	94.29	303,200.00	Adanya target Sub Kegiatan yang tidak terlaksana akibat rasionalisasi

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan dan Saran

4.1.1 Kesimpulan

- a) Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 merupakan laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan program kegiatan tahun 2021 yang telah disesuaikan realisasi dari perjanjian kinerja tahun 2021, serta menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 - 2021.
- b) Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 menjelaskan analisis dan evaluasi pencapaian target 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama.
- c) Rata-rata capaian 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama sebesar 102,6%. Artinya secara umum capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2021 termasuk kategori keberhasilan Sangat Baik yaitu (85%-100% atau > 100%)

Berikut rekapitulasi tingkat pencapaian kinerja utama dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rekapitulasi Tingkat Pencapaian Kinerja Utama
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021

Urutan	Skala Penilaian	Kategori Keberhasilan	Jumlah IKU	Persentase (%)
I	85%-100%	Sangat Baik	7	100
II	75%-84%	Baik	-	-
III	56%-74%	Cukup	-	-
IV	Capaian < 55%	Kurang	-	-

- d) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, masih terdapat berbagai masalah/kendala, namun hal

tersebut telah dan akan diupayakan langkah-langkah antisipatif untuk mengatasinya.

4.1.2 Saran

1. Diperlukan dukungan dan kerja keras semua pihak dalam pelaksanaan pencapaian penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang sesuai visi dan misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.
2. Lebih meningkatkan koordinasi dan peningkatan kerjasama yang lebih baik di lingkungan internal maupun eksternal Dinas Kearsipan dan Perpustakaan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan instansi terkait lainnya.

